

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

Teori adalah kumpulan konsep dan definisi yang saling terkait, dengan tujuan untuk membangun pemahaman yang terstruktur mengenai suatu fenomena. Pemahaman ini menghubungkan berbagai variabel untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Kajian teori berfungsi sebagai dasar pemikiran dalam menganalisis dan menjelaskan teori-teori yang mendasari penelitian ini, sehingga membantu peneliti untuk mencapai kebenaran ilmiah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dipaparkan beberapa teori yang digunakan sebagai referensi dalam upaya menyelesaikan masalah yang dibahas, yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

a. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Afriansyah et al (2023, p.2) mendefinisikan bahwasannya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pengembangan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri, yang melibatkan peningkatan kemampuan individu, kreativitas, kompetensi, serta daya pikir dan tindakan yang terus berkembang seiring waktu. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya yang mulia karena program ini tidak hanya membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup secara mandiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional. Nantinya keberhasilan yang diharapkan dalam pemberdayaan ini adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang mandiri, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, ataupun dalam bidang industri. Indikator-indikator ini mencakup berbagai aspek penting seperti berkurangnya jumlah penduduk berpendapatan rendah, berkembangnya peningkatan pengetahuan masyarakat, adanya peningkatan kepedulian masyarakat, serta kemandirian kelompok, dan juga kapasitas masyarakat. Secara istilah, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya penguatan, dan dalam konteks teknis, istilah pemberdayaan sering disamakan dengan pengembangan. Sementara itu, secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan,

yang dimaknai sebagai proses untuk mencapai kemampuan atau kekuatan dalam memperoleh daya tersebut.

Menurut Sumodiningrat dalam Bilote (2020, p.97) pemberdayaan masyarakat yakni salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan metode pendekatan berbasis partisipasi. Harapannya, upaya ini dapat memperkuat ikatan sosial sehingga masyarakat miskin dapat bertransformasi menjadi masyarakat yang lebih berdaya, sejahtera, adil, serta berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Sementara itu, menurut Muflich dalam Safyuddin (et al. 2017, p. 3) berpendapat bahwa perbedaan interpretasi terhadap konsep pemberdayaan justru menyebabkan pelaksanaan program pemberdayaan melemahkan kemandirian masyarakat. Dengan kata lain, program ini malah meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari pihak lain.

Menurut Najib daalam Irwan et al (2023 p. 119), terdapat berbagai cara untuk mengatasi kemiskinan, seperti pelatihan, pendampingan, serta bantuan modal usaha, salah satu pendekatan nya yaitu pemberdayaan masyarakat. Secara esensial, pemberdayaan berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal hanya berperan sebagai pemicu atau pendorong yang membangkitkan semangat, motivasi, serta dorongan bagi seseorang untuk memberdayakan, mengendalikan, dan mengembangkan dirinya sendiri sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan martabat kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan, agar mereka mampu menjadi lebih mandiri dan berdaya.

Menurut Gunawan Sumodiningrat dalam Musa (2017, p. 108), Secara umum, pemberdayaan masyarakat memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat. Kedua, untuk memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dalam tiga tahapan: (1) tahap awal, di mana pemerintah memulai inisiatif, melaksanakan program, dan menyasarkannya kepada masyarakat; (2) tahap partisipatif, yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program untuk

kepentingan bersama; dan (3) tahap emansipatif, di mana inisiatif pemberdayaan berasal dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan bertujuan untuk kepentingan mereka sendiri, dengan dukungan kolektif dari pemerintah dan masyarakat. Dalam setiap tahap pemberdayaan, peran pemerintah sangat penting untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, yang biasanya dimulai oleh pemerintah daerah. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang menekankan nilai sosial untuk membentuk paradigma baru yang berorientasi pada masyarakat, bersifat partisipatif, berbasis pemberdayaan, dan berkelanjutan. Meskipun konsep pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif strategi pembangunan telah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan teori, penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan dan belum sepenuhnya optimal.

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi topik yang sering dibahas karena memiliki hubungan yang erat dengan kemajuan dan perubahan suatu bangsa di masa depan. Kekurangan keterampilan dalam masyarakat dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai model pembangunan yang berorientasi pada rakyat bertujuan utama untuk meningkatkan derajat dan martabat masyarakat yang masih terbelenggu oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Dari sudut pandang Administrasi Negara, pemberdayaan masyarakat tidak hanya dipandang sebagai konsep ekonomi, tetapi juga sebagai pelaksanaan dari demokrasi ekonomi, di mana kegiatan ekonomi dilakukan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Oleh karena itu, pemberdayaan ini meliputi penguasaan teknologi, kepemilikan modal, akses pasar, serta keterampilan manajerial. Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan dengan efektif, aspirasi masyarakat harus didengar, disusun dengan jelas oleh pemerintah, dan dituangkan dalam kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat.

Upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya harus disertai dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan secara mandiri. Oleh karena itu, manajemen pembangunan memiliki peran penting dalam mendorong, membimbing, serta menciptakan lingkungan yang

mendukung inisiatif masyarakat dalam proses pembangunan. Langkah-langkah ini diwujudkan melalui kebijakan, regulasi, dan program pembangunan yang dirancang untuk mendukung, merangsang, serta membuka peluang bagi masyarakat dalam berkontribusi terhadap pembangunan.

Menurut Chambers dalam (Firmansyah 2012, p. 55) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan yang melibatkan berbagai aspek secara menyeluruh. Konsep ini mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan (*post-developmentalism paradigm*) yang menekankan pada masyarakat, bersifat partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Sementara itu, menurut Ife dalam Firmansyah (2012, p.55) keberhasilan program pemberdayaan masyarakat hanya bisa tercapai jika implementasinya didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip-prinsip ini mencakup pendekatan yang menyeluruh, keberlanjutan, keberagaman, perkembangan yang alami, keseimbangan, dan usaha untuk mengatasi struktur yang merugikan masyarakat. Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka program pemberdayaan akan memberikan manfaat yang nyata dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dengan menekankan partisipasi aktif mereka. Pemberdayaan tidak hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memberikan dukungan melalui kebijakan yang inklusif dan partisipatif. Proses pemberdayaan terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari tahap inisiasi hingga emansipasi, yang semuanya bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan serta memperkuat posisi mereka dalam struktur sosial dan ekonomi. Konsep pemberdayaan masyarakat berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, di mana aktivitas ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan bergantung pada penerapan prinsip-prinsip holistik, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam pengembangannya. Oleh karena itu, guna mencapai pemberdayaan yang efektif, diperlukan sinergi antara

pemerintah dan masyarakat, serta komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemandirian masyarakat.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Agus Syafi'i dalam Tanjung (2017, p. 28), tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah membangun kapasitas masyarakat agar mampu berkembang menuju kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memperluas cakupan pilihan bagi masyarakat, sehingga mereka dapat mengenali dan memilih hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan dalam meningkatkan ketahanan sosial. Dalam situasi krisis, seperti bencana alam atau pandemi, masyarakat yang telah diberdayakan memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi tantangan, beradaptasi, berinovasi, serta saling membantu, sehingga proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai investasi jangka pendek, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan sosial yang berkelanjutan.

Pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan individu dan masyarakat yang mampu berdiri sendiri dalam hal berpikir, bertindak, serta mengatur keputusan dan tindakan mereka secara mandiri. Menurut Ambar dalam Hastuti (2015, p. 14) kemandirian masyarakat merujuk pada kondisi di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk menganalisis, mengambil keputusan, dan bertindak secara tepat dalam menghadapi berbagai permasalahan. Kemampuan ini didukung oleh aspek kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di lingkungan mereka.

Menurut Hastuti (2015, p.15) pemberdayaan dilakukan untuk mencapai kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana individu atau kelompok yang telah mencapainya tidak lagi bergantung pada bantuan atau kedermawanan pihak lain dalam memenuhi kepentingan mereka. Tujuan pemberdayaan adalah untuk memperkuat posisi orang-orang yang lemah atau kurang beruntung. Selain itu, tujuan pemberdayaan masyarakat juga mencakup pembentukan kepemimpinan lokal. Melalui proses pemberdayaan, individu-individu di dalam masyarakat dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang diperlukan untuk memimpin

inisiatif dan program-program komunitas. Kepemimpinan yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri cenderung lebih memahami konteks lokal dan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga. Hal ini memperkuat kapasitas masyarakat untuk merespons tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat memiliki berbagai tujuan yang saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain. Dari pengurangan kemiskinan hingga peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, partisipatif, dan berdaya saing. Melalui proses ini, masyarakat tidak hanya mampu mengatasi tantangan yang dihadapi, tetapi juga dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pemberdayaan, kita dapat membangun pondasi yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

c. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bersifat sementara, artinya proses pemberdayaan berlangsung melalui tahap-tahap pembelajaran yang dilakukan secara bertahap hingga masyarakat mencapai tingkat kemandirian. Pemberdayaan masyarakat menurut Pathilaiya et al (2022, p. 18) memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan. Pada tahapan ini terbagi menjadi dua langkah. Yang pertama, kesiapan tenaga pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pekerja komunitas. Kedua, untuk persiapan di lapangan pada prinsipnya diupayakan untuk dilakukan secara non-direktif atau tanpa arahan langsung.
- 2) Tahapan Pengkajian *Assessment* (Penilaian). Tahapan ini merupakan suatu proses penggalian yang mampu dilakukan secara individu melalui berbagai kelompok dalam suatu masyarakat. Tahapan ini petugas harus berusaha untuk mengobservasi suatu permasalahan kebutuhan yang dirasakan “*feel needs*” dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

- 3) Tahap Pengembangan Alternatif Program atau Kegiatan Pada tahap ini, petugas yang berfungsi sebagai agen perubahan atau *exchange agent* memiliki peran untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menganalisis masalah yang mereka hadapi serta mencari solusi yang tepat. Dalam proses ini, masyarakat diharapkan dapat merancang berbagai alternatif program dan kegiatan yang bisa diimplementasikan sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah.
- 4) Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi. Pada tahapan ini, adanya agen perubahan berperan dalam membimbing suatu kelompok dalam merumuskan serta menetapkan program dan kegiatan yang akan mereka laksanakan guna mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, petugas juga membantu mengonsep gagasan mereka dalam bentuk tertulis, terutama jika diperlukan untuk menyusun proposal yang akan diajukan kepada pihak penyandang dana.
- 5) Tahap Implementasi Program. Dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader sangat vital untuk memastikan kelangsungan program yang telah direncanakan. Pada tahap ini, kolaborasi antara petugas dan masyarakat menjadi faktor penentu, karena dalam prakteknya, rencana yang sudah disusun dengan matang sering kali perlu disesuaikan saat diimplementasikan di lapangan.
- 6) Tahap Evaluasi. Penilaian adalah proses pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan, yang sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Partisipasi warga dalam penilaian ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan internal dalam komunitas dalam jangka pendek. Sementara itu, dalam jangka panjang, penilaian yang melibatkan masyarakat dapat memperkuat komunikasi serta mendorong penggunaan sumber daya yang ada secara lebih efisien.

- 7) Tahap Terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Melalui tahapan ini, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan meningkatkan kapasitas sosial serta ekonomi komunitas. Proses ini menekankan kolaborasi, partisipasi aktif, dan pembelajaran berkelanjutan agar masyarakat dapat mandiri dalam menghadapi tantangan mereka.

d. Model Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Chamber dalam Noor (2011, p. 88) menguraikan bahwa konsep pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), tetapi juga berupaya mencari alternatif guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Model ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat agar mereka mampu mengelola sumber daya yang tersedia secara lebih mandiri dan efektif. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan memperkuat struktur organisasi masyarakat. Menurut Sanjaya dalam Abdullah (2017, p. 47) pendekatan dapat diartikan sebagai sudut pandang atau titik tolak dalam suatu proses pembelajaran. Dalam hal ini, masyarakat didorong untuk membentuk kelompok atau organisasi yang dapat menjadi wadah bagi anggotanya dalam berdiskusi, berbagi pengalaman, serta merancang kegiatan yang bermanfaat secara kolektif.

Pentingnya pelatihan dan juga pendidikan dalam model pemberdayaan masyarakat tidak bisa diabaikan. Menurut Setyobudi dalam (Sumini 2018, p. 78) Pelatihan merupakan suatu proses yang terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas seseorang, serta diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja individu maupun organisasi tempat individu tersebut bekerja. Melalui program pelatihan keterampilan, masyarakat diajarkan untuk mengidentifikasi potensi lokal, mengelola usaha kecil, serta memanfaatkan teknologi sederhana untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk. Misalnya, kelompok tani dapat

diberikan pelatihan mengenai teknik pertanian yang lebih efisien, penggunaan pupuk organik, dan cara pemasaran hasil pertanian yang lebih baik. Dengan pengetahuan ini, diharapkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan keluarga.

Selanjutnya, pendekatan pemberdayaan juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Menurut Johnson dalam Jannah (2024, p. 149) Tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi faktor penghambat partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan. Hal ini dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan. Partisipasi aktif akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan juga inspirasi dalam kebutuhan mereka, sekaligus memperkuat rasa terhadap program yang dijalankan. Dengan cara ini, masyarakat merasa dihargai dan termotivasi untuk terlibat dalam pembangunan yang ada di lingkungan mereka.

Salah satu aspek penting dalam model pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan kemitraan antara berbagai stakeholder, seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta. Melalui kemitraan ini, sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman dapat dibagikan untuk menciptakan program yang lebih holistik dan berkelanjutan. Contohnya, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, sementara sektor swasta dapat berkontribusi dalam hal investasi dan penciptaan lapangan kerja. Pemberdayaan masyarakat juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang ada. Setiap komunitas memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan harus sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan tradisi yang ada. Dengan menghormati dan memanfaatkan kearifan lokal, program pemberdayaan akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat.

Selain itu, evaluasi dan pemantauan secara rutin juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari model pemberdayaan masyarakat. Hasil evaluasi ini berfungsi sebagai umpan balik untuk merencanakan kembali program,

memungkinkan pengukuran keberhasilan program, serta menggunakan masukan dari masyarakat untuk perbaikan di masa depan. Dengan demikian, model pemberdayaan yang diterapkan dapat terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang kompleks namun sangat krusial untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan, melibatkan semua pihak, dan memanfaatkan potensi lokal, masyarakat dapat diberikan kemampuan untuk meraih kesejahteraan. Proses ini lebih dari sekadar memberikan bantuan, tetapi juga membangun kemandirian dan rasa percaya diri masyarakat dalam mengelola kehidupan mereka sendiri. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dapat memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk komunitas dan lingkungan yang lebih besar. Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan dapat tercapai bersama.

Selain itu, salah satu elemen penting dalam model pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan jaringan sosial yang kokoh. Menurut Agusyanto dalam (Wicaksana 2016) jaringan sosial adalah jenis jaringan khusus yang menghubungkan titik-titik dalam jaringan melalui hubungan sosial. Berdasarkan jenis hubungan ini, anggota jaringan sosial tersebut adalah manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jaringan ini bisa menjadi sumber dukungan dan informasi bagi masyarakat. Dengan membangun koneksi antar individu dan kelompok, masyarakat dapat saling berbagi sumber daya, pengalaman, dan pengetahuan. Akses informasi juga memegang peranan penting dalam proses pemberdayaan. Dengan menyediakan akses informasi yang lebih baik, baik melalui teknologi digital maupun cara tradisional, masyarakat akan lebih mampu membuat keputusan yang berbasis informasi. Dengan informasi yang tepat, masyarakat dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki.

Di samping itu, model pemberdayaan juga harus mendorong inovasi dan kreativitas dalam masyarakat. Menurut Saud dalam Kristiawan et al (2018, p. 65) *Innovation* (inovasi) adalah suatu ide, barang, peristiwa, atau metode yang dianggap atau diamati sebagai hal baru bagi individu atau kelompok, baik berupa penemuan

maupun ciptaan. Masyarakat yang diberdayakan akan lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan dapat berpikir kritis untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Misalnya, kelompok usaha dapat didorong untuk menciptakan produk-produk unik yang memanfaatkan bahan lokal dan berkelanjutan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar tetapi juga melestarikan lingkungan. Inovasi ini akan membantu meningkatkan daya saing dan membuka peluang pasar baru.

Sejalan dengan itu, keberlanjutan program pemberdayaan harus menjadi fokus utama. Penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya memberikan dampak dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan efek positif jangka panjang bagi masyarakat. Untuk mencapai hal ini, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sangatlah krusial. Menurut Hikmat dalam (Hadi 2010) pemberdayaan dan juga partisipasi merupakan suatu jalan yang sangat efektif untuk meningkatkan aspek baik dalam bidang ekonomi, bidang sosial, dan juga transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya dapat menghasilkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ketika masyarakat merasa memiliki dan terlibat dalam setiap tahap, mereka akan lebih berkomitmen untuk menjaga dan melanjutkan inisiatif tersebut.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah dukungan dari pemerintah dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Regulasi yang mendukung usaha mikro, kecil, dan juga menengah (UMKM) serta program-program sosial yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemberdayaan. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam memfasilitasi akses terhadap sumber daya dan layanan publik yang berkualitas, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Akhirnya, kesadaran dan pengakuan atas hak-hak masyarakat juga merupakan bagian integral dari proses pemberdayaan. Pendidikan tentang hak-hak masyarakat, termasuk hak atas akses terhadap sumber daya, informasi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran. Masyarakat yang sadar akan hak-haknya cenderung lebih aktif dalam memperjuangkan kepentingan mereka, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara.

Dalam proses pemberdayaan, setelah permasalahan dipahami, langkah berikutnya adalah merancang model yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam penjelasan lain, sebuah model hanya dapat diterapkan pada komunitas yang memiliki kesamaan wilayah. Menurut Yefni (2018, p. 55) terdapat tiga jenis analisis model pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1) Sentralisasi

Model pemberdayaan sentralisasi adalah pendekatan di mana seluruh kegiatan dirancang dan ditentukan oleh pihak luar, bukan oleh masyarakat setempat. Mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, program telah disusun tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Akibatnya, masyarakat cenderung bersikap pasif, yang pada akhirnya membuat model ini kurang efektif. Hal ini terjadi karena program yang dijalankan sering kali tidak selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat.

2) Model Pemberdayaan *community development*

Model pemberdayaan *community development* merupakan pendekatan yang berfokus pada pengembangan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, atau kombinasi keduanya. Proses ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, magang, serta studi banding. Dalam pelaksanaannya, diperlukan peran fasilitator dari luar yang bertugas membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga program dapat berjalan secara optimal dan efektif. Tujuan akhir dari model ini adalah menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu mengelola sumber dayanya dengan baik.

3) Model Pemberdayaan Partisipasi

Model pemberdayaan partisipatif adalah pendekatan di mana seluruh proses, mulai dari penyadaran masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat tanpa keterlibatan pihak luar. Keikutsertaan aktif masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan model ini, sehingga pemilihan kepemimpinan yang tepat sangat diperlukan untuk mendorong dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pemberdayaan.

Dengan demikian, model pemberdayaan masyarakat haruslah menyeluruh, melibatkan berbagai aspek dan pendekatan yang saling terkait. Hasil akhir dari proses ini bukan hanya terwujudnya kesejahteraan ekonomi, tetapi juga terciptanya masyarakat yang lebih berdaya, dan juga mandiri. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya sekadar program, tetapi sebuah perjalanan bersama menuju kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Melalui kerja sama yang erat antara semua pihak, harapan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing dapat diwujudkan.

2.1.2 Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Sampah

Menurut Anggraeni dan Irviani (2019, p.6) sampah merupakan hasil buangan dari proses produksi, baik yang berasal dari rumah tangga maupun industri. Sedangkan menurut Mulasari dalam Elamin (2018, p. 369) mendefinisikan sampah sebagai benda atau bahan yang tidak lagi digunakan oleh manusia sehingga akhirnya dibuang. Secara umum, masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap sampah, menganggapnya sebagai sesuatu yang kotor, menjijikkan, dan harus segera dibakar atau dibuang. Sampah sendiri merupakan sisa material yang sudah tidak memiliki nilai guna dan dibuang ke lingkungan.

Menurut Huda dalam Faizah (2021, p.60) Pengertian sampah adalah bahan pembuangan tidak terpakai yang berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Mustofa dalam Asegaf (2023, p. 66) Program pengelolaan dan penanganan limbah perlu dilaksanakan secara komprehensif di seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya pada tingkat negara atau nasional, tetapi juga hingga tingkat desa, yang mencakup masyarakat di tingkat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah merupakan sisa dari aktivitas manusia sehari-hari atau proses alami yang berbentuk padat maupun semi-padat. Sampah ini dapat terdiri dari zat organik maupun anorganik, baik yang dapat terurai maupun yang tidak terurai, serta dianggap tidak memiliki nilai guna sehingga dibuang ke lingkungan. Selain itu, sampah juga dipandang sebagai material sisa yang tidak memiliki nilai ekonomi dan, dari sudut pandang lingkungan, merupakan limbah yang berpotensi mencemari serta mengganggu keseimbangan ekosistem.

Sampah adalah material sisa yang sudah tidak memiliki nilai guna, tidak digunakan, atau dibuang sebagai hasil dari suatu proses, menurut Nur (2018, p. 45) Pengelolaan sampah rumah tangga sangat penting dan tidak boleh diabaikan, karena jika tidak dikelola dengan benar, dapat menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan. Sebagai contoh, sampah organik yang membusuk di tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana, yang berkontribusi pada pemanasan global. Di sisi lain, sampah plastik yang dibuang sembarangan dapat mencemari tanah dan air serta membahayakan ekosistem. Oleh karena itu, setiap rumah tangga harus menerapkan pengelolaan sampah yang baik, seperti memilah sampah sesuai jenisnya, mendaur ulang, dan mengolah sampah organik menjadi kompos. Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat tidak hanya dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, tetapi juga turut menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga dapat mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam konsumsi dan penggunaan barang, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi generasi yang akan datang.

Masalah sampah tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menjadi persoalan sosial yang perlu mendapatkan perhatian karena berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Lingkungan memiliki peran krusial dalam mendukung kelangsungan hidup manusia, sehingga pengelolaan sampah yang efektif sangat diperlukan. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menerapkan sistem pengelolaan berbasis prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Konsep 3R ini menjadi landasan dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, dengan menerapkan berbagai upaya yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta penggunaan komposting dalam pengelolaan sampah di masyarakat Kavling Bumi Kahuripan. *Reduce* berarti mengurangi segala hal yang dapat menghasilkan sampah, *Reuse* berarti memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki kegunaan, dan *Recycle* berarti mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang berguna menurut (Junaidi dan Utama 2023).

b. Jenis-jenis sampah

Menurut Dewi (2021, p. 36) kunci keberhasilan suatu program kebersihan dan pengelolaan sampah terletak pada proses pemilahan. Tanpa pemilahan, pengolahan sampah akan menjadi sulit, mahal, dan berisiko tinggi dalam mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan. Pemilahan berarti memisahkan jenis sampah satu dengan yang lainnya. Setidaknya, pemilahan dilakukan dengan membagi sampah menjadi dua jenis, yakni :

- 1) Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup atau limbah rumah tangga, seperti sayuran dan buah-buahan, yang dapat diolah kembali menjadi kompos bernilai guna. Menurut Puger 2018, (p. 127) sampah organik merupakan limbah yang masih dapat didaur ulang menjadi bentuk lain yang bermanfaat bagi manusia. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah organik justru dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan. Di beberapa negara maju, para ahli kimia sering menganggap sampah organik yang terbuang tanpa pengolahan sebagai bentuk pemborosan, atau dalam istilah yang dikemukakan oleh Irwan dalam Puger dalam Puger 2018, (p. 127) disebut sebagai "uang yang menguap." Hal ini menunjukkan bahwa dengan penanganan yang tepat, sampah organik dapat menjadi sumber keuntungan yang signifikan bagi pengelolanya. Secara keseluruhan, pengelolaan sampah organik memiliki dampak besar terhadap kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan para ahli, sampah organik dapat diubah dari permasalahan menjadi sumber daya yang bermanfaat. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah organik perlu terus ditingkatkan guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan, serta mendukung kesejahteraan bagi generasi mendatang.
- 2) Sampah non-organik merupakan jenis sampah yang dapat didaur ulang menjadi barang lain yang memiliki manfaat, seperti plastik, kaca, dan logam. Menurut Linda (2018, p. 6), sampah anorganik adalah limbah yang berasal dari bahan non-hayati, baik hasil produksi sintetik maupun olahan

teknologi, termasuk bahan tambang serta hasil pengolahan bahan hayati. Tantangan yang paling utama dalam pengelolaan sampah anorganik adalah keterbatasan jarak waktu yang cukup lama untuk terurai secara murni. Sebagai contoh, plastik dapat membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai di lingkungan, yang menyebabkan akumulasi sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) serta mencemari tanah dan air, sehingga berdampak negatif pada ekosistem. Selain itu, sampah anorganik juga berpotensi menghasilkan polutan berbahaya jika dibakar atau dibiarkan membusuk di alam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dampak negatif dari sampah anorganik dan menerapkan strategi pengelolaan yang efektif, seperti mendaur ulang atau memanfaatkan kembali material tersebut guna mengurangi dampak lingkungan.

Pemilahan sampah merupakan langkah awal yang penting dalam pengelolaan sampah anorganik. Dengan memisahkan sampah anorganik dari sampah organik dan limbah berbahaya lainnya, kita dapat meningkatkan efisiensi daur ulang dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Banyak negara dan daerah telah menerapkan sistem pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, mendorong masyarakat untuk aktif dalam proses ini. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, "Pemilahan sampah yang baik dapat mengurangi volume limbah hingga 50% dan meningkatkan tingkat daur ulang." Daur ulang adalah salah satu solusi terbaik untuk mengelola sampah anorganik. Proses ini melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan kembali material anorganik untuk membuat produk baru. Misalnya, botol plastik bekas dapat diolah menjadi serat tekstil, dan kaleng logam dapat dilebur dan dibentuk kembali menjadi produk baru. Menurut laporan oleh *World Economic Forum*, "Daur ulang sampah anorganik dapat mengurangi kebutuhan akan sumber daya baru, menghemat energi, dan mengurangi emisi karbon." Dengan mengadopsi praktik daur ulang, kita tidak hanya mengurangi jumlah sampah anorganik yang dihasilkan, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.

Namun, meskipun daur ulang merupakan langkah yang sangat penting, masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Banyak masyarakat yang belum

sepenuhnya memahami pentingnya daur ulang atau tidak memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas daur ulang. Oleh karena itu, edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah anorganik dan pentingnya daur ulang sangat diperlukan. Kampanye kesadaran dapat membantu mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga meningkatkan tingkat partisipasi dalam program daur ulang. Secara keseluruhan, pengelolaan sampah anorganik adalah masalah yang kompleks tetapi sangat penting. Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan dari sampah anorganik, masyarakat, pemerintah, dan sektor industri perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah yang lebih efektif. Pemilahan, daur ulang, dan inovasi teknologi harus menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan sampah anorganik untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Dengan tindakan kolektif, kita dapat mengurangi dampak negatif dari sampah anorganik dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

c. **Bentuk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga**

Dengan adanya UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, penerapan pengelolaan sampah yang efektif menjadi sangat krusial. Pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui pendekatan 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*), yang mencakup penggunaan kembali, pengurangan, dan daur ulang sampah.

- 1) *Reuse* (Menggunakan Kembali) : yaitu dengan cara menggunakan kembali sampah yang sudah terpakai sebelumnya, dalam hal ini sampah yang tadinya sudah tidak terpakai nantinya akan digunakan kembali untuk dimanfaatkan menjadi nilai yang berguna.
- 2) *Reduce* (mengurangi) : yakni suatu upaya untuk mengurangi jumlah sampah dalam penumpukan. Dengan dilakukan proses *reduce* nantinya sampah yang dibuang akan dikumpulkan menjadi barang ataupun pupuk yang bernilai tinggi.
- 3) *Recycle* (mendaur ulang) : yakni upaya untuk memanfaatkan sampah setelah dilakukan proses pengolahan. Setelah melakukan proses pengolahan sampah rumah tangga kemudian di daur ulang sesuai dengan jenisnya.

Tidak hanya menggunakan metode 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) tetapi juga di tempat penelitian ini menggunakan metode komposting yang dimana sampah rumah tangga dijadikan sebagai pupuk yang menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Metode komposting adalah cara untuk menghasilkan kompos dari bahan organik melalui proses dekomposisi yang dibantu oleh mikroorganisme pengurai, seperti menurut Ermavitalini dalam I. nurani Dewi 2020 (p. 13). Kompos mengandung unsur hara mineral yang penting untuk menyuburkan tanah serta mendukung pertumbuhan tanaman produktif dan tanaman penghijauan yang ramah lingkungan menurut Widarti dkk dalam I. nurani Dewi (2020, p. 13).

Dengan demikian, pengelolaan sampah menggunakan metode komposting dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sampah rumah tangga. Kegiatan pengolahan sampah rumah tangga menjadi kompos bertujuan untuk:

- (1) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga,
- (2) memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga, dan
- (3) meningkatkan pendapatan masyarakat.

Program ini juga memiliki tiga manfaat utama, yaitu:

- a. Menambah nilai pengetahuan, yaitu mengubah sampah melalui proses *reuse* dan *recycle* menjadi kompos.
- b. Memiliki nilai konservasi, yang bertujuan mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).
- c. Menambah nilai ekonomi, dengan memberikan keuntungan ekonomi melalui penjualan kompos.

d. Pengelolaan Sampah

Awalnya ketika jumlah penduduk masih sedikit, sampah bukanlah masalah yang berarti. Namun, dengan bertambahnya populasi dan meningkatnya aktivitas manusia, volume serta variasi sampah pun mengalami peningkatan. Menurut Hakim dalam Asegaf (2023, p. 66), pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi limbah sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem

pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan komprehensif, terutama di wilayah perkotaan, untuk mengatasi meningkatnya jumlah sampah.

Pengelolaan sampah menjadi sangat penting karena dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap kesehatan dan lingkungan. Sampah dapat menjadi sarang bagi organisme penyebab serta pembawa penyakit, sekaligus mencerminkan kondisi lingkungan dan mengganggu keseimbangannya. Oleh karena itu, berbagai negara di dunia berupaya menangani permasalahan sampah meskipun memerlukan biaya yang besar. Di Indonesia, sistem pengelolaan sampah umumnya masih belum optimal. Sampah yang berasal dari Berbagai jenis sampah, seperti yang berasal dari rumah tangga, pasar, dan industri, umumnya langsung dibawa ke tempat penampungan sementara (TPS) tanpa melalui proses pemilahan atau pengolahan sebelumnya. Kemudian, sampah dari TPS dipindahkan ke tempat pembuangan akhir (TPA) untuk ditimbun. Metode pengelolaan ini belum mengoptimalkan sampah sebagai sumber daya yang memiliki potensi nilai ekonomi.

Langkah pertama dalam pengelolaan sampah adalah melakukan pemilahan langsung dari sumbernya, seperti rumah tangga, pasar, industri, fasilitas umum, kawasan komersial, dan lain sebagainya. Sampah organik, seperti sisa makanan dan dedaunan, dipisahkan dari sampah anorganik, seperti plastik dan kaca. Setelah dipilah, sampah dapat didaur ulang di tempat asal atau dikumpulkan untuk dijual dan diolah lebih lanjut oleh industri daur ulang. Selain itu, sebelum dibuang ke tempat penampungan sementara (TPS), sampah juga dapat dimanfaatkan kembali atau diolah menjadi kompos untuk digunakan di lokasi asalnya. Kurangnya kemajuan dalam pengelolaan sampah disebabkan oleh keterbatasan sistem yang belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat mengenai nilai guna sampah serta kebiasaan dalam membuang sampah masih bervariasi. Pemilahan dan pemanfaatan sampah di tingkat rumah tangga belum menjadi kebiasaan umum, sehingga dibutuhkan waktu serta edukasi untuk mendorong perubahan perilaku tersebut.

Volume sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan kapasitas sistem pengangkutan dan pengelolaannya, sehingga menyebabkan akumulasi di berbagai lokasi. Hingga kini, pengelolaan sampah masih menjadi tantangan bagi banyak

kota, karena jika tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Sampah yang tidak terkontrol akibat aktivitas manusia dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti menurunnya estetika perkotaan serta munculnya bau tidak sedap akibat proses pembusukan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, diperlukan pengelolaan sumber daya ekologis yang lebih bijaksana oleh masyarakat setempat. Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan serta pemanfaatan sampah agar memiliki nilai ekonomi dan lingkungan.

Teknis operasional sampah dapat dilakukan dengan sistem pengelolaan sampah yang terdiri atas subsistem pengelolaan sampah menurut Damanhuri & Padmi dalam Ivakdalam dan Far (2022, p. 169) adalah :

- 1) Pewadahan merupakan proses menampung sampah dalam suatu wadah dengan mempertimbangkan jenis dan komposisinya. Wadah yang digunakan dapat berupa tempat sampah, kontainer, atau fasilitas penyimpanan lainnya yang dirancang untuk menampung sampah sebelum proses pengangkutan atau pengolahan lebih lanjut.
- 2) Pengumpulan merupakan proses mengumpulkan sampah langsung dari sumbernya untuk kemudian diangkut ke lokasi pengolahan sampah atau tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa melewati tempat penampungan sementara (TPS). Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai alat transportasi, seperti gerobak sampah, motor pengangkut sampah, kendaraan pick-up terbuka, atau truk.
- 3) Pemindahan adalah proses memindahkan sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA) menggunakan sarana transportasi yang sesuai. Peralatan yang umum digunakan dalam proses ini meliputi kontainer dan transfer depo untuk memfasilitasi pengangkutan sampah secara lebih efisien.
- 4) Pengangkutan sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengangkutan langsung dan pengangkutan tidak langsung. Pengangkutan langsung dilakukan dengan membawa sampah langsung dari sumbernya ke tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa melalui tempat penampungan sementara

(TPS). Sementara itu, pengangkutan tidak langsung melibatkan proses pemindahan sampah yang telah dikumpulkan di TPS sebelum akhirnya diolah di TPA. Beberapa jenis kendaraan yang digunakan dalam proses ini meliputi *compactor truck*, *dump truck*, dan *amroll truck*.

- 5) Pengolahan merupakan proses yang bertujuan untuk mengubah sifat, komposisi, atau volume sampah agar lebih mudah dikelola dan dimanfaatkan.

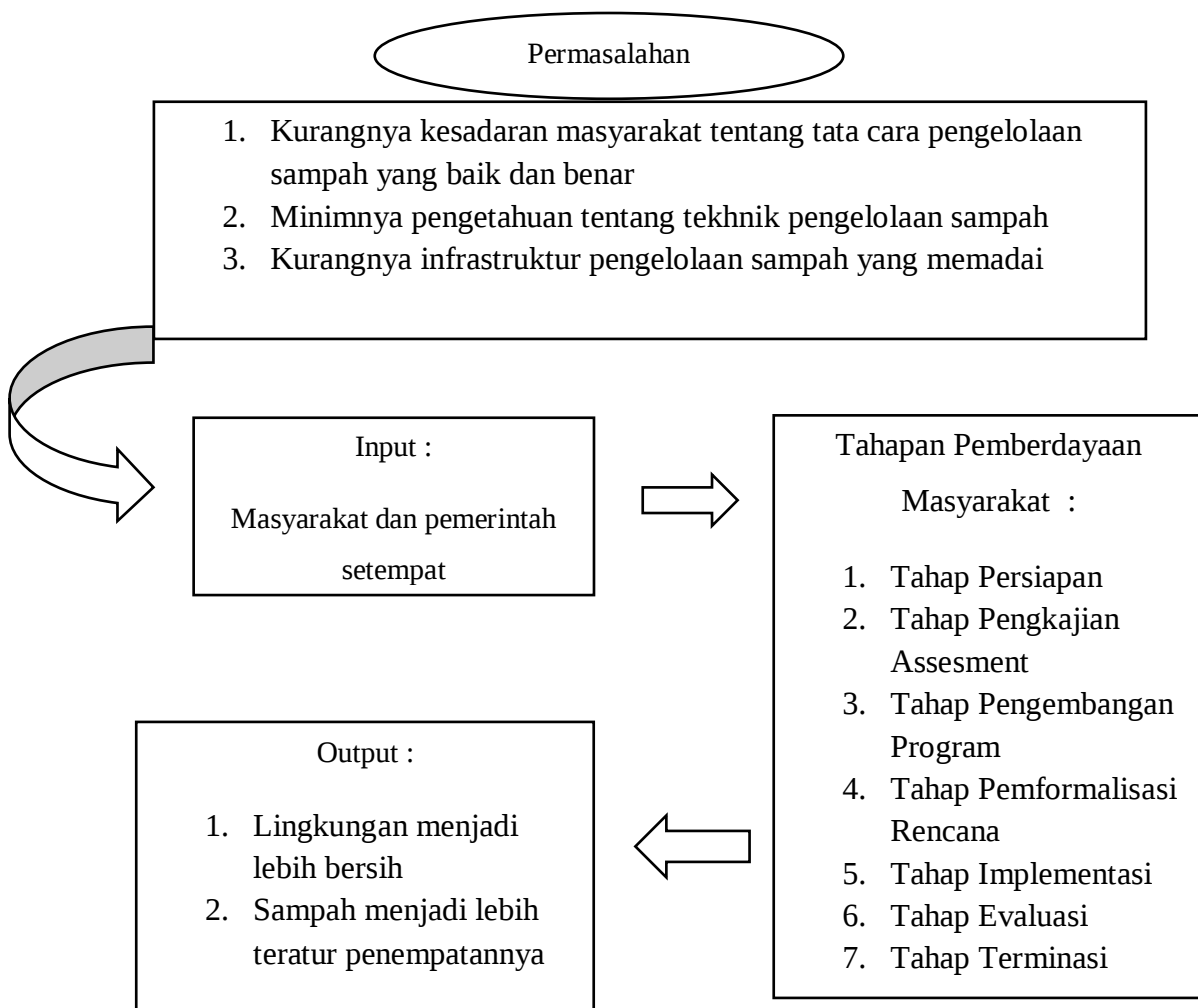
Manajemen sampah yang efektif tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga berperan dalam menjaga estetika lingkungan. Proses ini mencakup pengumpulan, transportasi, hingga pemusnahan atau pengolahan sampah dengan cara yang tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Pengolahan sampah bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah atau mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih berguna, seperti melalui metode pembakaran, pengomposan, penghancuran, pengeringan, atau daur ulang.

Oleh karena itu, pemilahan sampah sejak dari sumbernya menjadi langkah penting dalam meningkatkan nilai guna limbah, termasuk memisahkan sampah organik dan anorganik serta memanfaatkannya kembali sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Berbagai metode pengolahan, seperti pengomposan, pembakaran, daur ulang, dan pengurangan penggunaan bahan sekali pakai, perlu diterapkan secara lebih luas. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku dalam pengelolaan sampah. Dengan sistem pengelolaan yang baik, tidak hanya kesehatan masyarakat yang terjaga, tetapi juga kelestarian lingkungan dapat dipertahankan, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan.

2.2 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2019, p. 283), kerangka berpikir adalah suatu model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dan faktor-faktor yang teridentifikasi dalam suatu penelitian atau kajian. Penelitian ini dilaksanakan di Kavling Bumi Kahuripan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Berdasarkan observasi awal, ditemukan sejumlah masalah di lingkungan sekitar,

seperti banyaknya sampah yang berserakan di jalanan, yang menyebabkan penumpukan sampah. Meskipun begitu, masyarakat di Kavling Bumi Kahuripan menyadari bahwa pengelolaan sampah yang buruk dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti banjir dan masalah kesehatan akibat sampah yang menumpuk. Melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami cara mengelola sampah dengan benar. Secara garis besar, kerangka konseptual penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Peneliti 2024

2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nalhadi (2020) Program pengabdian ini membuktikan keberhasilannya dalam merancang peralatan untuk memproduksi pupuk cair dengan memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai bahan baku. Proses pembuatan pupuk cair ini menggunakan bioaktivator EM4, yang berperan penting dalam mempercepat fermentasi limbah organik menjadi pupuk yang bermanfaat bagi tanaman. Dengan memanfaatkan bahan yang mudah diperoleh dan menerapkan metode yang relatif sederhana, hasil penelitian ini memberikan dampak positif dalam pengelolaan limbah rumah tangga sekaligus menghasilkan produk yang berguna bagi sektor pertanian, terutama dalam meningkatkan kesuburan tanah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2020) menunjukkan bahwa melalui kegiatan ini, ibu-ibu PKK Desa Balle berhasil mengembangkan kemampuan untuk membuat aksesoris dari limbah botol plastik secara mandiri. Aktivitas ini tidak hanya memberikan kemampuan baru bagi para peserta, tetapi juga membuka peluang lapangan pekerjaan baru di desa tersebut. Selain itu, pembuatan aksesoris ini memberikan dampak ekonomi yang positif dengan menambah penghasilan masyarakat melalui hasil penjualan aksesoris rumah tangga dan wanita. Dengan demikian, kegiatan ini turut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pemanfaatan limbah plastik yang sebelumnya tidak terpakai.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2021) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah proses pembuatan pupuk, sekitar 67% masyarakat masih cenderung menggunakan pupuk anorganik. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa pembuatan pupuk bokashi terlalu rumit, ketidakpastian hasil yang diperoleh, serta waktu pertumbuhan tanaman yang lebih lama dibandingkan dengan pupuk anorganik. Namun, sekitar 33% masyarakat mulai menunjukkan ketertarikan untuk beralih ke pupuk organik seperti bokashi setelah memahami manfaatnya, serta karena bahan-bahan yang digunakan mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Temuan ini menunjukkan adanya peluang peningkatan penggunaan pupuk organik di masyarakat jika edukasi mengenai keunggulannya lebih diperluas.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Asnifatima (2018) menunjukkan bahwa setelah dilaksanakan kegiatan evaluasi, terjadi perubahan signifikan dalam perilaku masyarakat. Masyarakat kini lebih peduli terhadap lingkungan dan kesehatan mereka. Hal ini dapat dilihat dari semakin jaranginya sampah berserakan di sekitar tempat tinggal. Selain itu, kegiatan tersebut juga berhasil menciptakan kawasan tempat tinggal yang lebih segar dan asri, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan sekitar.

Penelitian yang dilakukan oleh Jannah, H. (2020) menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan program pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan dan pengolahan sampah skala rumah tangga. Perangkat desa memberikan tanggapan positif terhadap program ini, karena sesuai dengan kebutuhan, mengingat hingga saat ini masalah sampah belum memiliki solusi atau penanganan yang efektif. Dengan adanya pelatihan pengolahan sampah, diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah, serta memberikan keterampilan kepada masyarakat untuk membuat kompos dari limbah organik dapur rumah tangga. Kompos tersebut dapat digunakan sebagai pupuk tanaman, sehingga lingkungan menjadi lebih bersih dan nyaman. Selain itu, program pengabdian ini juga dapat mempererat hubungan antara civitas akademik perguruan tinggi dan masyarakat desa.

Kesimpulan dari penelitian-penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan limbah rumah tangga menunjukkan bahwa inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi lingkungan dan ekonomi lokal. Dalam penelitian Nalhadi (2020), pembuatan pupuk cair dari limbah rumah tangga menggunakan bioaktivator EM4 terbukti efektif meningkatkan kesuburan tanaman dan mengurangi limbah. Fauziah (2020) melaporkan bahwa pengolahan limbah botol plastik menjadi aksesoris memberikan peluang usaha baru bagi Ibu PKK Desa Balle. Sementara itu, Septiani et al. (2021) menemukan bahwa meskipun banyak masyarakat masih memilih pupuk anorganik, terdapat minat untuk beralih ke pupuk organik seperti bokashi setelah memahami manfaatnya. Asnifatima et al. (2018)

mencatat peningkatan kepedulian lingkungan di Desa Cimanggu Satu, sedangkan Jannah (2020) menekankan pentingnya pelatihan dalam pengelolaan sampah rumah tangga, yang diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Secara keseluruhan, program-program ini berhasil memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup mereka.

2.4 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian adalah aspek utama yang harus dijawab dalam sebuah penelitian, di mana jawaban yang diperoleh dapat membantu dalam menyelesaikan serta memahami permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, diajukan beberapa pertanyaan penelitian berikut:

- a. Bagaimana tahapan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah rumah tangga di Kavling Bumi Kahuripan ?
- b. Bagaimana tahapan pengelolaan sampah rumah tangga di Kavling Bumi Kahuripan?